



Beri saya waktu enam jam untuk menebang sebatang pohon dan saya akan menghabiskan empat jam pertama untuk menajamkan kapaknya.

ABRAHAM LINCOLN



Pelaksanaan Mitigasi Risiko Akreditasi S/M Berbasis Data Sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Target Mutu Pendidikan

Sandra Taufik Hidayat

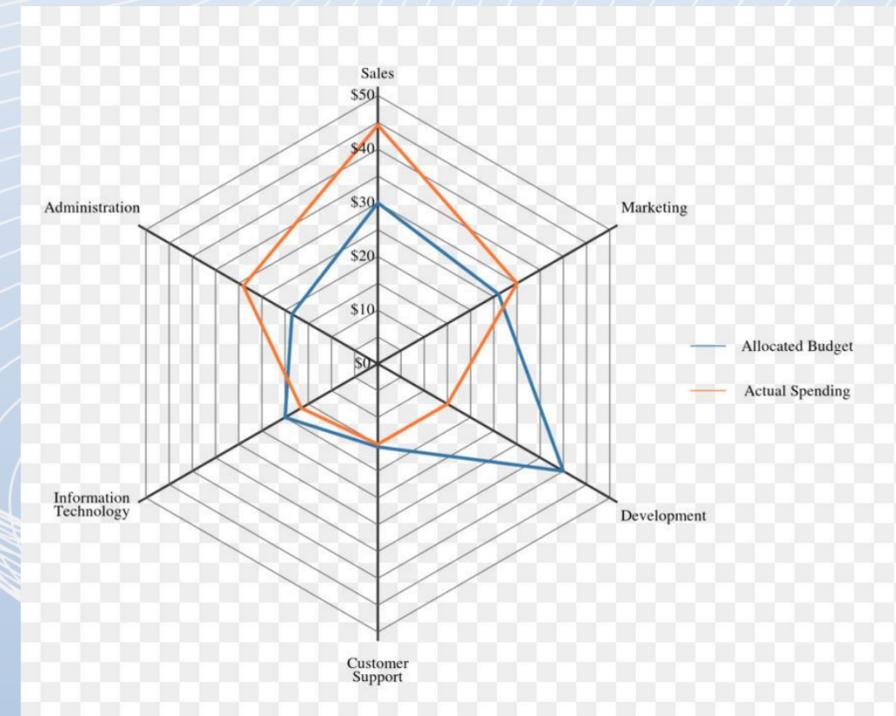
RAKORDA 1. Bandung, 22-24 Februari 2023

PETA KONSEP MITIGASI RISIKO BASIS DATA



DATA HASIL AKREDITASI S/M

PEMERINGKATAN, KADALUARSA



DATA KINERJA ASESOR

KODE ETIK

Does power have a good solution but the market doesn't exist? Therefore we conduct market research to show whether our solution can be made

Pembahasan



01.

Latar Belakang

02.

Dasar Hukum

03.

Tujuan dan Manfaat

04.

Analisis Data

05.

Strategi Mitigasi Risiko





LATAR BELAKANG

01.

Adanya informasi/aduan masyarakat tentang pelanggaran norma dan kode etik yang dilakukan oleh Asesor saat bertugas di sekolah/madrasah

02.

Adanya ketidak patuhan sekolah/madrasah terhadap aturan pelaksanaan akreditasi sehingga menyebabkan sertifikat akreditasinya kadaluarsa yang pada akhirnya merugikan peserta didik.

03.

Kepatuhan terhadap POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah belum sepenuhnya dilakukan yang berdampak pada proses dan kualitas akreditasi satuan pendidikan, contoh tidak adanya sosialisasi, tidak ada validasi, dsb..

04.

Beberapa permasalahan lainnya terkait pelaksanaan akreditasi cukup mempengaruhi profesionalitas kinerja asesor dan akan berdampak pada menurunnya kredibilitas akreditasi

05.

Diperlukan adanya rumusan mitigasi risiko akreditasi berbasis data untuk meminimalkan dan mencari solusi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi dalam proses bisnis akreditasi sekolah/madrasah guna peningkatan mutu pendidikan pada sekolah/madrasah



MITIGASI RISIKO

Preventive Action

Penghindaran Risiko / Upaya untuk mengurangi/ menghentikan dampak negative (kerugian) yang sudah terjadi

Early Warning System or Alert System

Membangun system peringatan dini



Maintain Risk

Mempertahankan tingkat risiko tertentu jika ada hal lain yang lebih berpotensi kerugian lebih besar

Controllable Risk

Berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin.

Jenis Strategi Mitigasi Risiko (MR)

Risk Acceptance

- Dlm jangka waktu panjang lebih menguntungkan jika menerima risikonya.
- Kemungkinan terjadinya kecil
- Dampak yang dihasilkan juga kecil
- Kemungkinan hasil yang didapat lebih besar dari risikonya

Risk Transfer

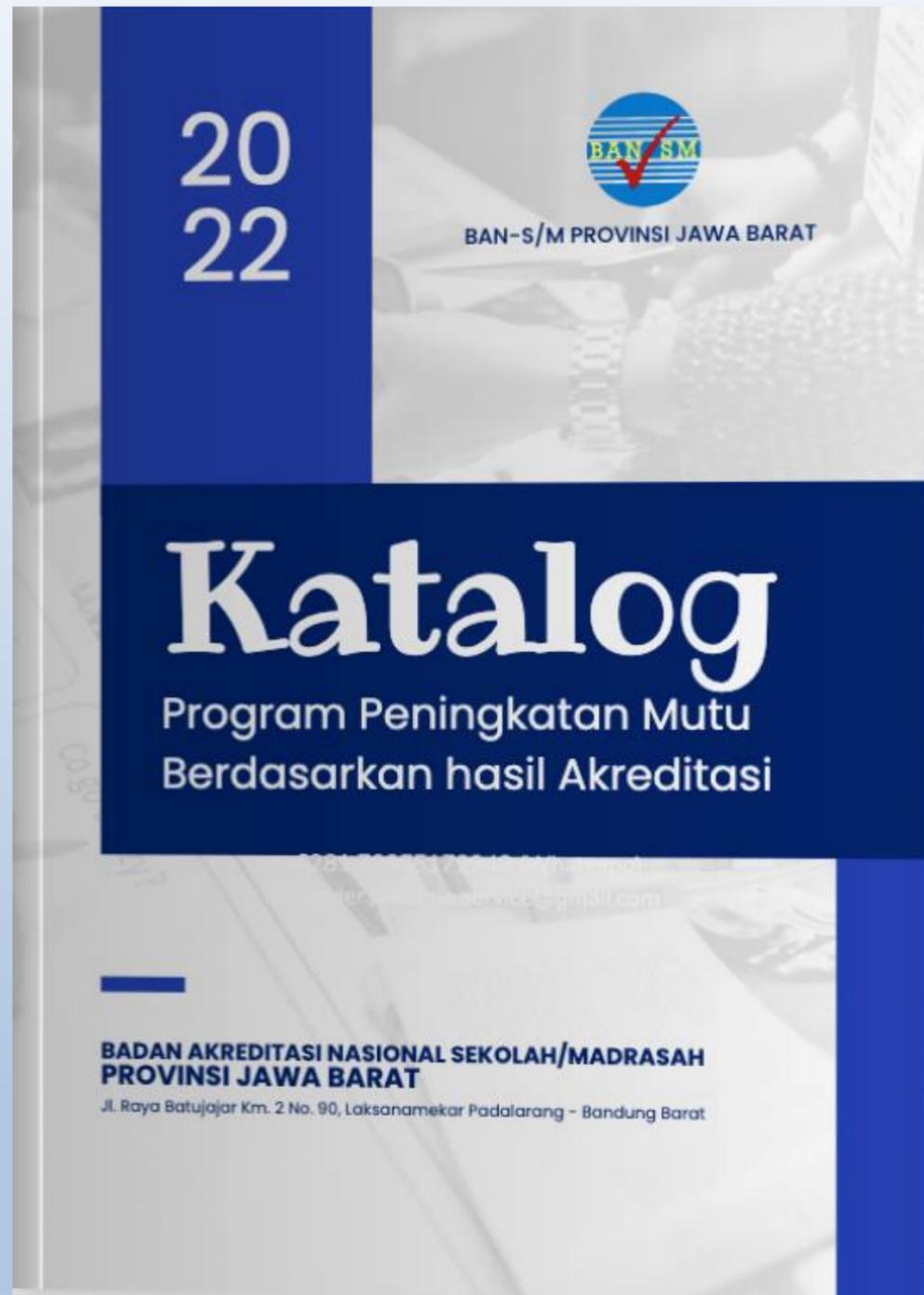
- Mentrasfer risiko ke pihak ke – 3
- Misalnya: penyebaran peraturan/kebijakan dilakukan oleh KPA.

Risk Avoidance

- Menghindari risiko sebelum terjadi
- Kemungkinan harus berkompromi dgn menggunakan strategi lain untuk menghindari risiko

Risk Reduction

- Menurunkan kemungkinan risiko terjadi atau
- Menurunkan dampak negatif yang akan terjadi



<https://heyzine.com/flip-book/fb119d3581.html>

Note : BAN S/M : katalog, pembinaan asesor melalui PPDA dan rekomendasi. Disdik “ membantu prosesi kebutuhan sosialisasi dan sarana” Kanwil : “ Madrasah Reform melalui EDM ERKAM dan pembinaan IT”

DASAR HUKUM



UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Bebas dari KKN

UU No. 31/99 jo UU No. 20/2021 tentang TP Korupsi

PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

PP No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Permendikbud 13/2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD PNF

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 58 Ayat 1 :

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah :

Kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan



TUJUAN DAN MANFAAT

01.

Meningkatkan pelaksanaan setiap Langkah pada POS akreditasi agar proses akreditasi berjalan dengan lancar

02.

Meningkatkan norma dan etika asesors dan sekolah dalam proses akreditasi

03.

Meningkatkan kepatuhan sekolah terhadap kebijakan dan peraturan akreditasi

04.

Meminimalisasi isu negatif yang sering terjadi dalam proses akreditasi

05.

Memeroleh solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan akreditasi.

ANALISIS DATA



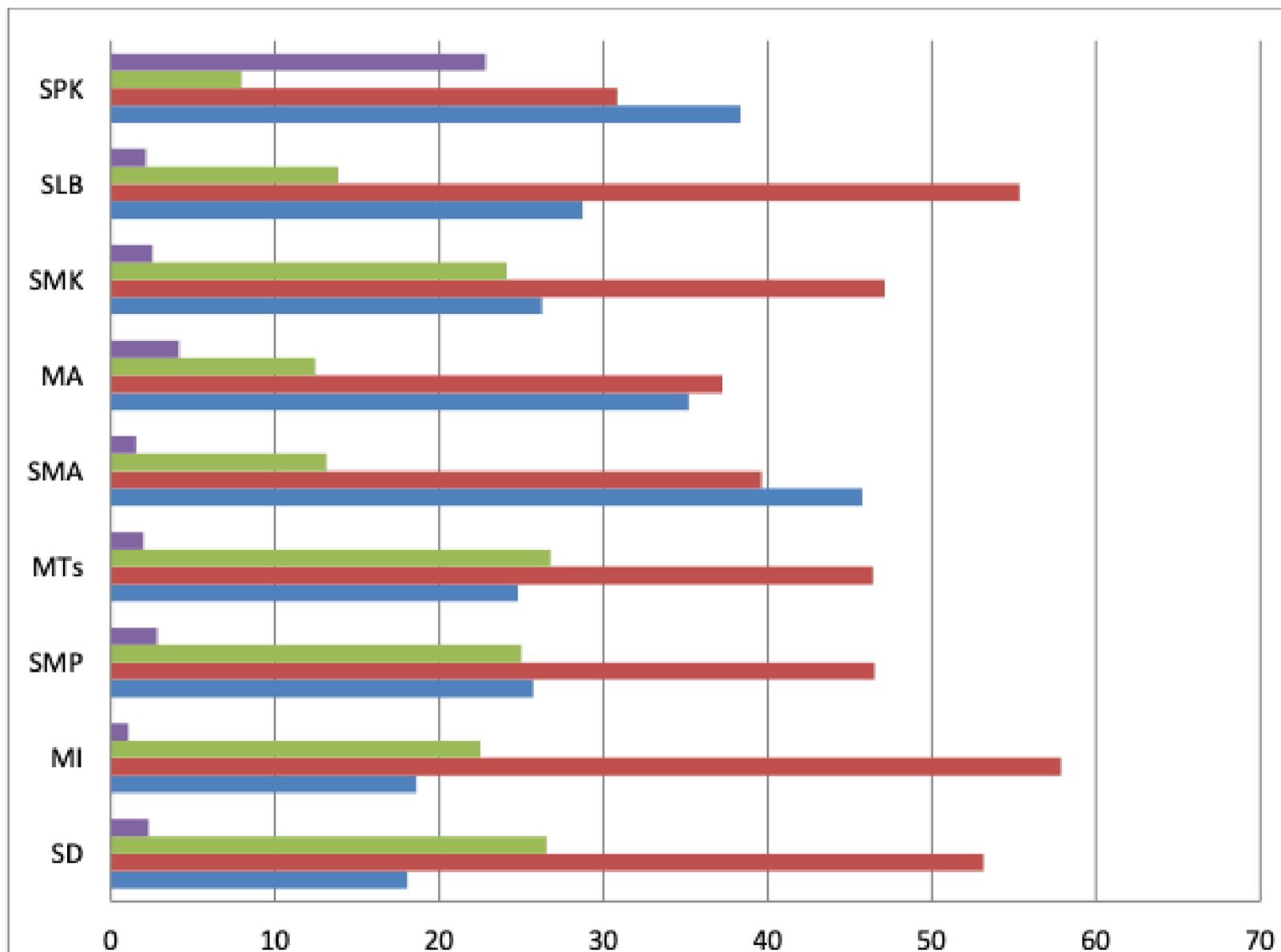
2019

Tabel 7. Jumlah S/M Berdasarkan Peringkat Akreditasi Per Jenjang

Jenjang	PERINGKAT A		PERINGKAT B		PERINGKAT C		PERINGKAT TT		Jumlah	Persen
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
SD/MI	9.196	23,39%	23.262	59,18%	6.100	15,52%	751	1,91%	39.309	63,03%
SMP/MTs	3.876	29,31%	6.281	47,50%	2.748	20,78%	319	2,41%	13.224	21,21%
SMA/MAN	1.977	34,09%	2.485	42,84%	1.179	20,33%	159	2,74%	5.800	9,30%
SMK	619	20,65%	1.287	42,93%	9.23	30,79%	169	5,64%	2.998	4,81%
SLB	137	13,25%	512	49,52%	367	35,49%	18	1,74%	1.034	1,65%
Jumlah	15.805	25,34%	33.827	54,24%	11.317	18,15%	1.416	2,27%	62.365	100,00%

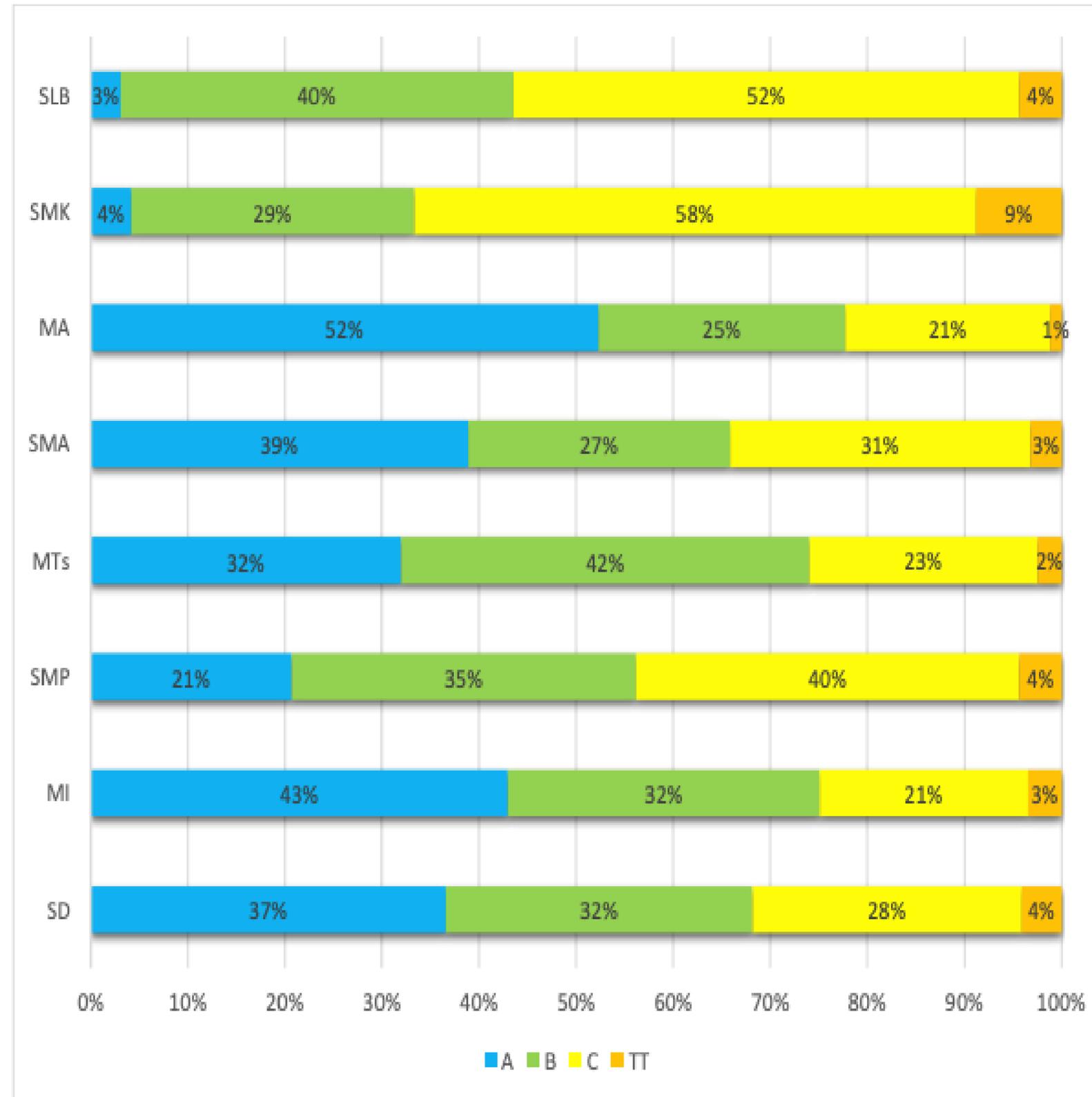
2020

Hasil akreditasi sekolah/madrasah untuk setiap jenjang satuan pendidikan seperti terlihat dalam gambar berikut.



	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	SLB	SPK
TT	2.26	1.05	2.82	2	1.52	4.14	2.52	2.13	22.83
C	26.52	22.51	24.97	26.8	13.11	12.45	24.1	13.83	7.96
B	53.15	57.85	46.51	46.4	39.63	37.24	47.12	55.32	30.85
A	18.07	18.59	25.7	24.8	45.73	35.17	26.26	28.72	38.31

2021



Gambar 5. Peringkat akreditasi hasil visitasi berdasarkan jenjang



REKAP SASARAN

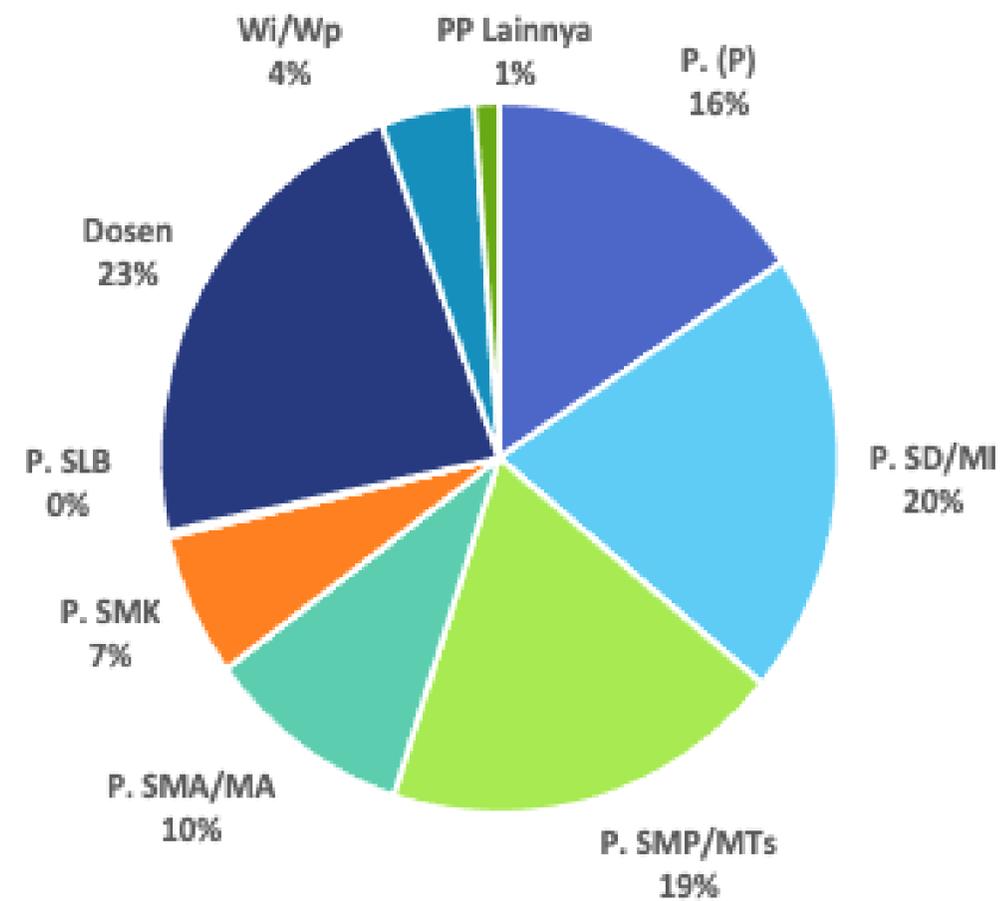
No	Kab/Kota	Automasi 2022 1 Tahun	BT	RE 2018	sertifikat kedaluwarsa	TT	Grand Total
1	Kab. Bandung	141	30	418	68		657
2	Kab. Bandung Barat	67	14	368	50	2	501
3	Kab. Bekasi	145	52	299	79	5	580
4	Kab. Bogor	280	44	463	60		847
5	Kab. Ciamis	85	8	267	37		397
6	Kab. Cianjur	92	45	593	49	1	780
7	Kab. Cirebon	54	8	392	96	1	551
8	Kab. Garut	94	14	587	118	5	818
9	Kab. Indramayu	86	12	384	36	1	519
10	Kab. Karawang	92	18	240	7		357
11	Kab. Kuningan	19	13	474	1		507
12	Kab. Majalengka	122	6	144	33		305
13	Kab. Pangandaran	30	4	152	16		202
14	Kab. Purwakarta	45	4	192	8	2	251
15	Kab. Subang	71	8	462	26		567
16	Kab. Sukabumi	126	34	295	109		564
17	Kab. Sumedang	56	6	265	18		345
18	Kab. Tasikmalaya	75	16	424	59	2	576
19	Kota Bandung	128	25	123	39	1	316
20	Kota Banjar	24	1	13	3		41
21	Kota Bekasi	125	15	356	69	3	568
22	Kota Bogor	50	9	95	2		156
23	Kota Cimahi	18	5	66	9		98
24	Kota Cirebon	39	3	50	9		101
25	Kota Depok	155	25	194	23	3	400
26	Kota Sukabumi	26	4	53	3		86
27	Kota Tasikmalaya	42	3	95	3		143
	Grand Total	2287	426	7464	1030	26	11233

No	Row Labels	Automasi 2022 1 Tahun	BT	RE 2018	sertifikat kedaluwarsa	TT	Grand Total
1	MA	40		303	26	2	468
2	MI	159		1186	59	6	1538
3	MTs	148	1	697	64	4	1143
4	SD	1266	112	3786	532	7	6074
5	SLB	89	5	2	29		204
6	SMA	79	47	404	35	4	593
7	SMK	125	30	262	117		567
8	SMP	381	231	824	168	3	1773
	Grand Total	2287	426	7464	1030	26	11233

KINERJA ASESOR 2022

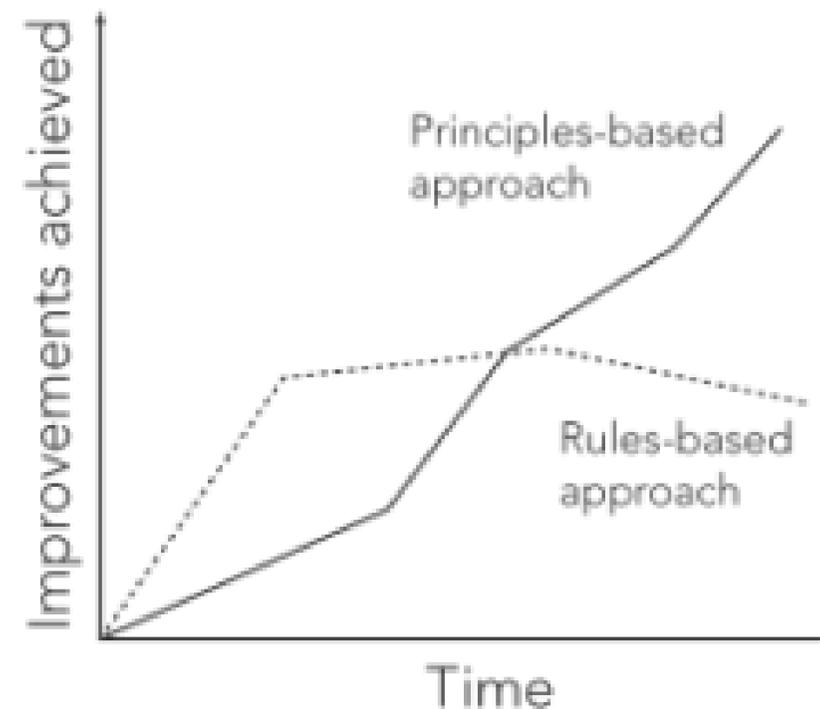
UNSUR	JUMLAH
P. (P)	134
P. SD/MI	173
P. SMP/MTs	163
P. SMA/MA	84
P. SMK	56
P. SLB	2
Dosen	194
Wi/Wp	38
PP Lainnya	10
	854

KINERJA	JUMLAH
Baik	401
Kurang	333
Tidak Ditugaskan	120
	854



KAB/KOTA	JUMLAH	KAB/KOTA	P. (P)	P. SD/MI	P. SMP/MTs	P. SMA/MA	P. SMK	P. SLB	Dosen	Wj/Wp	PP Lainnya	Grand Total
Kab. Bandung	42	Kab. Bandung	8	10	8	3	4		9			42
Kab. Bandung Barat	64	Kab. Bandung Barat	9	17	13	6	3			14	2	64
Kab. Bekasi	24	Kab. Bekasi	5	5	3	5	1		3		2	24
Kab. Bogor	75	Kab. Bogor	8	18	15	11	8		12	3		75
Kab. Ciamis	28	Kab. Ciamis	5	4	13		2		4			28
Kab. Cianjur	50	Kab. Cianjur	8	20	10	1	2		8	1		50
Kab. Cirebon	41	Kab. Cirebon	8	9	5	3	2		13		1	41
Kab. Garut	57	Kab. Garut	13	17	8	7	4	1	7			56
Kab. Indramayu	15	Kab. Indramayu	2	6	4		1		2			15
Kab. Karawang	33	Kab. Karawang	4	12	4	4	2		7			33
Kab. Kuningan	14	Kab. Kuningan		3	3	1			7			14
Kab. Majalengka	16	Kab. Majalengka	3	2	6	2	1		2			16
Kab. Pangandaran	8	Kab. Pangandaran	1	2	2	2	1					8
Kab. Purwakarta	12	Kab. Purwakarta	1	2	2	1	1		5			12
Kab. Subang	14	Kab. Subang	5	3	2	2	2					14
Kab. Sukabumi	39	Kab. Sukabumi	7	11	12	4	4	1				39
Kab. Sumedang	37	Kab. Sumedang	10	8	5	2	2		9		1	37
Kab. Tasikmalaya	21	Kab. Tasikmalaya	1	4	8	4	4					21
Kota Bandung	103	Kota Bandung	7	6	14	7	2		48	17	2	103
Kota Banjar	6	Kota Banjar	1		1	2	1		1			6
Kota Bekasi	22	Kota Bekasi	4	3	7	2			6			22
Kota Bogor	16	Kota Bogor	4	1	5	1	2		3			16
Kota Cimahi	8	Kota Cimahi			2				5	1		8
Kota Cirebon	26	Kota Cirebon	2		1	4	3		16			26
Kota Depok	29	Kota Depok	6	6	6	3			6	2		29
Kota Sukabumi	23	Kota Sukabumi	6		1	3	2		10		1	23
Kota Tasikmalaya	31	Kota Tasikmalaya	6	4	3	4	2		11		1	31
	854		134	173	162	84	56	2	193	38	10	854

2 Rates of quality improvement with principles-based versus rules-based approaches



Schematic representation of the slower onset but potentially more enduring gains in quality improvement arising from principles-based approaches, compared with the more rapid but plateauing (or even declining) gains from rules-based approaches.

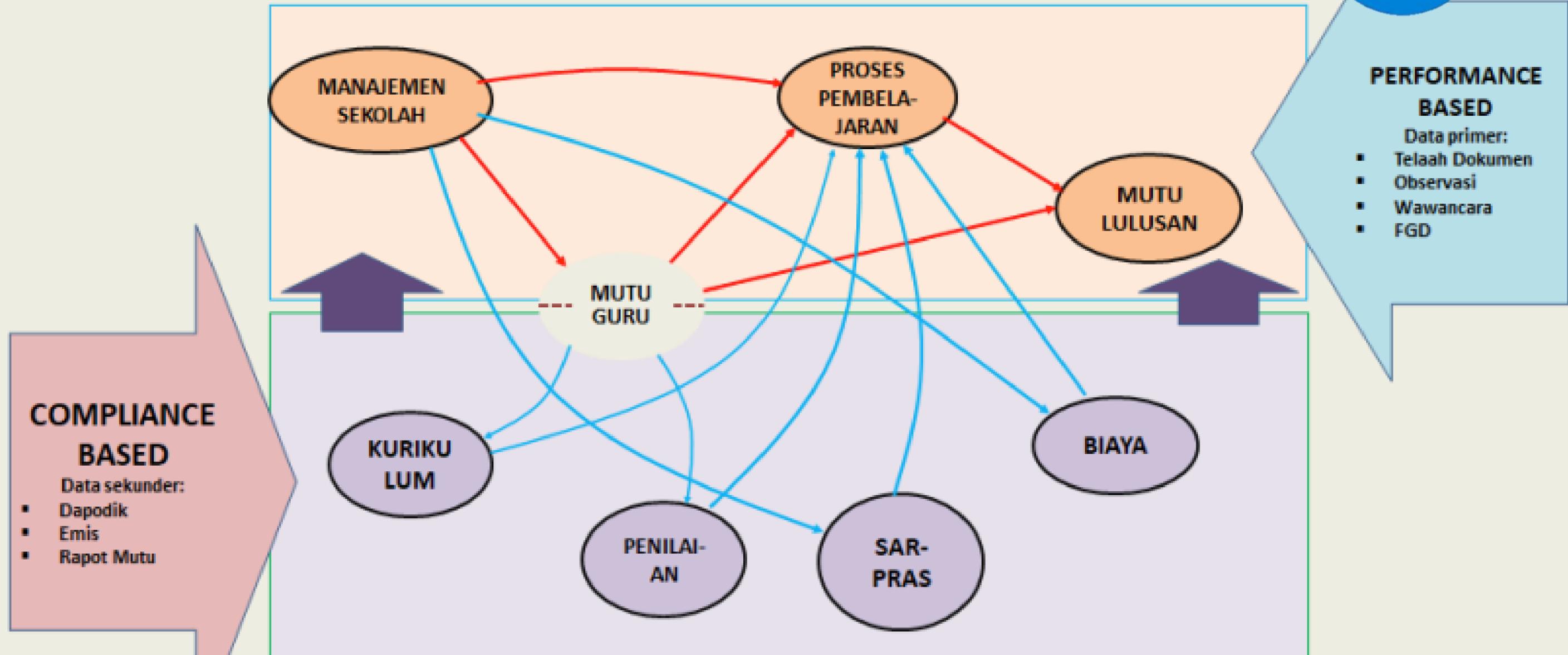


Gambar 3. Dampak bagi peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi dari dua pendekatan dalam akreditasi (PB dan RB) (Heywood, 2007).



EFEKTIF DAN EFISIEN ?

Noted : “ Masukan Sekolah Tidak terakreditasi tidak berhak mengeluarkan ijazah selain berkurangnya kuota masuk jenjang berikutnya, tambahan : “Tidak mendapatkan Dana BOS”



Pola Akreditasi dengan Prinsip Performance Based pada IASP 2020



Townsend dan Butterworth terdapat beberapa hal yang menjadi penentu terwujudnya pendidikan yang bermutu,

- a) Keefektifan gaya;
- b) Kepemimpinan kepala sekolah;
- c) Partisipasi aktif dan rasa tanggungjawab guru dan staff;
- d) Keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif;
- e) Kurikulum yang relevan;
- f) Memiliki visi dan misi yang terarah;
- g) Iklim sekolah yang kondusif, dan
- h) Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara instrinsik (M. Fitrah, 2017 : 33)



Dengan pergeseran ini instrumen akreditasi akan mengalami perubahan fundamental, bukan sekedar menyempurnakan butir-butir dan atau analisis, tetapi perubahan paradigma.

Lahirlah IASP 2020 :

(1) instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik para tingkatan sistem sekolah untuk menggali indikator-indikator dan atribut-atribut yang memberi informasi yang jelas tentang potensi sekolah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas; (2) lingkup informasi yang harus digali harus reasonable; (3) instrumen akreditasi harus meaningful dan discriminatory agar bisa membedakan mana sekolah yang melakukan hal-hal meaningful bagi proses pembelajaran dan mana yang belum; (4) instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi indikator-indikator yang dapat mengungkap informasi/attribute dengan leverage paling besar terhadap kualitas pembelajaran; (5) penyederhanaan metodologi pelaksanaan akreditasi sehingga proses akreditasi dapat dilakukan secara lebih praktis, dengan waktu yang cukup pendek; dan (6) mekanisme pelaksanaan reakreditasi harus lebih praktis sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia.



DI DUNIA
*beserta segala
permasalahannya*



TERIMA KASIH